BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Partisipasi Politik KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik 2015

1. *Praktik Pemantauan KIPP Gresik*

Sesuai dengan jadwalnya, penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gresik 2015 terbagi ke dalam delapan tahapan kegiatan, mulai dari rekrutmen PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUD Gresik. Dari semua tahapan tersebut, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara merupakan klimaks yang menunjukkan partisipasi politik sebagian besar masyarakat Gresik. Pemantauan yang dilakukan oleh KIPP Gresik selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, menghasilkan beberapa temuan pelanggaran yang terjadi. Beberapa temuan yang telah dicatat oleh KIPP Gresik adalah,

1) Di TPS 02 Desa Kebonangung Kec. Ujungpangkah, Petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam melaksanakan penghitungan suara, akibatnya semua surat suara dihitung ulang
2) Di TPS 8 dan 9 Kel Sidokumpul Kec. Gresik, tidak mengumumkan DPT di TPS. KPPS mengaku kurang mengetahui prosedur pelaksanaan.
3) Di TPS 8 Kel. Sidokumpul Kec Gresik kotak suara tidak disegel pada saat pengumutan suara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Di TPS 9 Desa Kembangan Kec. Kebomas, Penutupan TPS lebih panjang 15 Menit dari waktu yang ditentukan.
5) Di TPS 15 Desa Suci, Area 2 Meter dari TPS ada photo pasangan calon.
6) Di TPS 9 Desa Randuagung Kec. Kebomas, ditemukan pemilih yang mewakili orang tuanya.
7) Di TPS 3 Kel. Tlogobendo, Kec. Gresik, tidak mengumumkan DPT di TPS. KPPS mengaku kurang mengetahui prosedur pelaksanaan.
8) Di PPK Cerme, ditemukan kesalahan dalam penulisan kolom jumlah daftar pemilih laki-laki dan perempuan tertukar, akibat dari kesalahan tersebut anggota PPK berinisiatif memperbaiki tanpa melibatkan saksi dan Panwas.
9) Di PPK Bungah, C1 di desa abar abir hilang, akibat keteledoran tersebut saksi dan panwas sepakat untuk membuka Plano.
10) Ditemukan 106 TPS tidak menggunakan tenda, dan lebih 89 TPS yang dibuat kurang representative, sehingga terkesan pelaksanaan pemilu kurang berwibawa.[1]

Pemantauan pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan seseorang maupun kelompok. Merujuk pada apa yang disebut oleh Ramlan Surbakti sebagai kriteria konsep atau “rambu-rambu” partisipasi politik bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku

[1] Laporan akademik KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilbub Kabupaten Gresik 2015, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam yang berupa sikap dan orientasi. Ha ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.[2]

Kedua, kegiatan partisipasi politik yang dimaksud adalah kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau pun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.[3]

Melalui kriteria tersebut, pemantauan pemilu di Indonesia yang pertamakali diinisiasi oleh KIPP dapat dikategorikan sebagai wujud konsep partisipasi politik dengan dasar bahwa pemantauan pemilu merupakan kegiatan atau perilaku luar indvidu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku yang berupa sikap dan orientasi.

Selain itu, kegiatan pemantauan pemilu tersebut juga diarahkan untuk memberikan pengaruh kepada pemerintah, dalam hal ini kaitannya dengan proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Terpenuhinya dua unsur tersebut menjadikan pemantauan pemilu yang dilakukan secara sukses atau tidak, langsung ataupun tidak langsung akan tetap termasuk dalam sebuah kegiatan partisipasi politik.

Lebih dalam lagi, kesadaran politik masyarakat adalah salah satu target utama KIPP ketika melakukan kegiatan pemantauan pemilu. Timbulnya

[2] Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 180-181.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semangat untuk bersama-sama memantau atau mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi tentu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang sadar akan pentingnya terlibat dalam proses politik yang sedang berlangsung. Pemikiran seperti inilah yang ditularkan oleh individu-individu KIPP ketika mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan pemilu.

KIPP juga dapat dikategorikan sebagai aktor yang berupaya mendorong masyarakat kepada klasifikasi pemain *(gladiator)* dalam tingkatan partisipasi politiknya. Mereka yang tergolong ke dalam klasifikasi pemain *(gladiator*) akan selalu aktif dalam mengikuti proses politik.[4] Hal tersebut akan mudah tercapai melalui tingginya kesadaran politik yang telah dimiliki masyarakat. Semakin aktif masyarakat dalam berpolitik tentunya semakin kuat pula legitimasi dari setiap produk yang dihasilkan melalui proses politik.

Upaya pendorongan partisipasi masyarakat oleh KIPP Gresik dalam Pilkada kemarin dibuktikan dengan beberapa kegiatan KIPP yang turut serta melibatkan masyarakat Gresik. Misalnya dalam perekrutan para pemantau Pilkada Gresik 2015, 70 orang pemantau yang terdaftar merupakan gabungan dari para pengurus KIPP Gresik dan relawan yang dijaring dari masyarakat umum.

Bukan hanya pemantauan, KIPP Gresik juga tergolong aktif dalam melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat Gresik. Seperti yang dikatakan Ali Mahmud,

[4] Milbrath dan Goel, dalam Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dalam Pilkada Kemarin selain melakukan pemantauan kita juga gencar melakukan sosialisasi Pilkada. Bentuk kegiatan sosialisasi tersebut sepertihalnya kita melakukan aksi turun ke jalan memanfaatkan acara car free day. Kita juga bekerjasama dengan KPUD Gresik untuk melakukan sosialisasi Pilkada kepada pemilih pemula dengan menjaring peserta dari sekolah-sekolah. Selain sosialisasi berbentuk kegiatan fisik, kami juga melakukannya dengan cukup masif di dunia Maya. Sosialisasi Pilkada serta himbauan kepada masyarakat agar tidak Golput menjadi salah satu fokus utama kami.Hal tersebut mengingat terdapatnya ajakan Golput yang coba disuarakan oleh kelompok tak bertanggung jawab dalam Pilkada Kemarin.".[5]

Akan tetapi, muncul persoalan ketika eksistensi KIPP belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti penuturan lanjutan dari Ali Mahmud,

> "Secara pribadi saya melihat bahwa sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya tahu tentang keberadaan lembaga pemantau pemilu. Padahal seharusnya masyarakat bisa bersama-sama kami dalam mengawal pemilu".[6]

Suka atau tidak, fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa popularitas pemantau pemilu di tengah-tengah masyarakat semakin meredup, berbeda dengan pengawas dan penyelenggara pemilu yang hari ini kian diperbincangkan masyarakat. Begitu juga di Kabupaten Gresik, KIPP Gresik menyadari bahwa mereka belum mendapatkan hasil yang memuaskan dalam rangka menarik antusiasme masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KIPP Gresik dalam Pilkada Gresik 2015 sebenarnya cukup efektif guna menjaga eksistensi organisasi mereka. Ketika eksistensi tersebut telah diupayakan maka selayaknya disertai dengan kampanye yang dilakukan secara masif, hingga masuk ke ruang-ruang diskusi seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi

---

[5] Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang telah dilakukan oleh KIPP Gresik dalam Pilkada 2015 adalah salah satu peluang untuk mempublikasikan eksistensi mereka dan mengkampanyekan pemantauan pemilu secara masif.

Jika dibandingkan dengan Pileg 2014, terdapat penurunan angka partisipasi masyarakat Gresik pada Pilkada kemarin. Sesuai data dari KPUD Gresik bahwa pada Pilkada Serentak kemarin jumlah pemilih yang hadir sebesar 70,15%, sementara pada Pileg 2014 jumlah kehadiran pemilih mencapai 78,75%.[7] Penurunan yang signifikan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk KIPP Gresik yang telah berkomitmen untuk menyukseskan pemilu di Kabupaten Gresik.

2. *Independensi Para Kader KIPP Gresik*

Netralitas pemantau maupun pengawas menjadi salah satu syarat utama yang harus tetap dijaga dalam penyelenggaraan sebuah pemilu. Pada ruang independensi, organisasi KIPP Gresik menyatakan kepada peneliti bahwa mereka benar-benar menjaga independensi dalam melakukan kegiatannya, "Kami selalu menjaga independensi mas, tidak pernah ada deal-deal politik dengan para kontestan dalam setiap pemilu".[8] Begitulah penuturan saudara Ali Mahmud yang merupakan Bendahara KIPP Gresik.

Ketidakberpihakan KIPP kepada salah satu kontestan Pilkada Gresik dalam Pikada Kabupaten Gresik 2015 diperkuat dengan keterangan beberapa anggota KIPP yang mengungkapkan bahwa mereka hanya mengenal para

[7] Release KPU, Hasil Pemilu, http://.kpud-gresikkab.go.id (Senin, 1 Agustus 2016, 19.00)
[8] Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 6 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontestan yang bertarung dalam Pilkada kemarin tanpa memiliki kedekatan khusus. Dikatakan oleh Khoirun Ni'am,

> "Tidak ada hubungan yang spesial, kami kenal para kontestan namun tidak begitu dekat. Kita tentunya selalu memegang teguh komitmen independensi dalam melakukan pemantauan pemilu. Secara organisasi maupun individu kami telah menghindari afiliasi politik dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu".[9]

Senada dengan partnernya, Ali Mahmud mengungkapkan bahwa untuk menjaga independensi mereka tetap berhubungan secara profesional dengan para kontestan tanpa disertai suatu hubungan yang spesial.

3. *Independensi Pemantauan Pemilu Dalam Konsep Civil Society*

KIPP adalah sebuah lembaga yang pertama kali menginisiasi gerakan pemantauan pemilu di Indonesia. Berusaha untuk menjadi lembaga yang independen di tengah rezim orde baru adalah tantangan terberat pada awal pendirian KIPP. Pemantauan pemilu yang dikampanyekan sebagai wujud pengawasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah juga merupakan hal baru di tengah masyarakat pada waktu itu. Hingga akhirnya, kehadiran KIPP bisa dianggap sebagai salah satu penguat tercetuskannya reformasi yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dan meruntuhkan kekuasaan orde baru.

Era reformasi dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik di Indonesia. Transisi pemerintahan pasca orde baru dianggap sebagai awal dari kehidupan demokrasi yang sebenarnya, sebagaimana salah satu ciri yang muncul dari sebuah *civil society*, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani

[9] Khoirun Ni'am, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.[10] Dengan demikian, sebuah perubahan besar telah dialami masyarakat Indonesia setelah lengsernya pemerintahan orde baru yang dinilai banyak kalangan tidak menerapkan demokrasi dengan semestinya.

Perubahan penting lainnya di era reformasi adalah ketika terbebasnya ruang publik dari intervensi-intervensi pemerintah yang berlebihan. Wilayah publik yang bebas juga merupakan ciri-ciri yang senantiasa muncul dalam kehidupan *civil society* di mana ruang publik ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.[11]

Kebebasan dalam ruang publik menunjang penguatan posisi seluruh lembaga dan organisasi kemasyarakatan termasuk KIPP ketika menyampaikan sebuah pendapat, kendati pendapat tersebut kontradiktif terhadap sikap pemerintah. Semangat *check and balances* bisa diterapkan seluruh unsur warga negara untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Hingga kini, Pilihan untuk tetap berada pada jalur Independen tetap dipertahankan KIPP yang telah berbentuk perhimpunan. Konsekuensi dari pilihan tersebut yang utama tentu KIPP harus sungguh-sungguh

[10] TIM ICCE JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, 281.
[11] Ibid, 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan Independensi yang mereka usung dalam pergerakannya. Sejumlah tantangan kembali muncul, seperti ketahanan finansial dalam tubuh organisasi serta kesejahteraan para anggota yang bisa saja menghambat eksistensi KIPP. Peneliti menganggap bahwa persoalan finansial merupakan faktor yang kerap kali membuat sebuah organisasi atau lembaga harus menukar independensi yang dimiliki dengan materi guna membiayai kegiatan-kegiatannya.

Di Gresik, dalam pilkada 2015 KIPP Gresik mengaku tidak begitu besar mengeluarkan pembiayaan dalam melakukan pemantauan. Penggalian dana lebih banyak diperoleh dari swadaya para anggota,

> "Mengenai pembiayaan pemilu kemarin terus terang kita para pengurus KIPP Gresik swadaya mas, tidak banyak uang yang dikeluarkan. Paling-paling kebutuhan dana yang paling besar digunakan untuk Trasportasi para relawan dan itupun tidak semuanya dapat. Pemberiannya tidak begitu formal. Biaya lain terkait Tanda Pengenal Pemantau dilapangan sudah diakomodir oleh KPU. Ketika kita sudah terakreditasi KPU otomatis kita diberi Tanda Pengenal Tersebut".[12]

Pembiayaan dalam pemantauan Pilkada Gresik kemarin sesuai dengan keterangan bendahara KIPP ada pada kisaran 2 sampai 3 juta rupiah, jumlah yang relatif kecil untuk melakukan sebuah kegiatan berskala Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut tentu sangatlah jauh jika dibandingkan dengan anggaran yang di terima Panwaslih pada Pilkada kemarin dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.[13] Pengeluaran terbesar saat melakukan pemantuan menurut KIPP digunakan untuk pembiayaan transportasi para pemantau.

---

[12] Khoirun Ni'am, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.
[13] Koran Jawa Pos, edisi 25 April 2015, diakses dari http://pressreader.com (25, 07-2016, 20.00 WIB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta minimnya anggaran yang terdapat pada tubuh organisasi KIPP tersebut bisa saja menjadi salah satu penyebab kesulitan KIPP ketika akan melakukan rekrutmen anggota pemantau pemilu. Keharusan untuk bersikap independen dalam pesta demokrasi yang sedang berlangsung adalah salah satu resiko bagi mereka yang bergabung dengan KIPP.

Seperti memakan buah simalakama, menggenggam independensi dalam momen pemilihan umum bagi KIPP berkonsekuensi terhadap finansial mereka yang hanya bersumber dari keswadayaan anggota dan hasilnya tak begitu besar. Namun, peneliti menganggap bahwa menjaga independensi lebih penting kendati pada penerapannya membuat keringnya anggaran dalam sebuah organisasi seperti KIPP.

KIPP adalah bagian dari pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada di dalam *civil society*. Dengan independensinya, KIPP dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas substansi kehidupan yang demokratis di Indonesia. KIPP memiliki kemampuan untuk memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas yang dapat mendistribusikan nilai-nilai pendidikan politik bagi masyarakat.

KIPP juga memiliki kontribusi dalam mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pemantauan dalam pemilu maupun kegiatan-kegiatan politik lainnya menjadi penunjang bagi terciptanya pemilihan umum yang *fair*, bebas, dan berkualitas yang merupakan salah satu tolok-ukur perkembangan demokrasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iklim demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah faktor terpenting penunjang bagi perkembangan konsep *civil society* di masyarakat. Arena publik yang terbuka dan otonom menjadikan perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti KIPP bebas mengekspresikan pendapat melalui berbagai kegiatan yang memiliki nilai-nilai positif.

Peran KIPP dalam penguatan ruang publik juga sejalan dengan pemikiran Habermas tentang demokrasi deliberatif. Demokrasi didasarkannya pada model proseduralis yang mengedepankan diskursus melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan kondisi komunikasi.[14] Sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain. Arena dimana diskursus tersebut dapat berlangsung disebutnya *public sphere* (ruang publik). Pada ruang publik ini terdapat kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. Dalam hal ini model demokrasi deliberatif tak lain merupakan konsep *political public sphere* (ruang publik politik).[15]

4. *Independensi Dalam Konsep Pengawasan*

Pada dasarnya, KIPP Gresik sebagai pemantau pemilu menjalankan fungsi mereka mencakup Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan oleh penyelenggara dan seluruh kontestan pemilu. Perbedaan antara pemantau

---

[14] Habermas, *"There Normative Modele of Democracy"*, dalam Benhabib, *"Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political"*, (New Jersey: Princeton University Press, 1996); Candra Kusuma, "Demokrasi Deliberatif Di Era Otonomi Daerah", (Tesis, Departemen Sosiologi FISIP UI, 2012), 38.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengawas yang utama terdapat pada kelembagaan Pengawas pemilu yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dengan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap ketidaksesuaian prosedur yang terjadi dalam pemilu. Sementara lembaga atau organisasi pemantau hanya berhak untuk melakukan pemantauan tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Disamping itu, pemantau pemilu yang bersifat independen secara finansial menurut peneliti menjadi keunggulan bagi KIPP. Hal tersebut membuat KIPP sulit menerima intervensi dari pihak-pihak tertentu. Komitmen KIPP Gresik yang tidak berafiliasi dengan para kontestan maupun pihak-pihak lain yang meiliki kepentingan dalam Pilkada 2015 tentunya membuat posisi KIPP Gresik lebih berwibawa di kalangan elit politik. KIPP Gresik seharusnya tidak memiliki beban untuk mengungkapkan fakta apapun yang ditemukan dalam setiap pemantauan pemilu.

Hasil pemilu yang dipantau oleh pemantau independen seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Gresik sudah tentu lebih memiliki nilai *plus* daripada pemilu yang diselengarakan tanpa adanya pemantau. KIPP Gresik diibaratkan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan atau auditor terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang dibentuk oleh negara.

B. Problem KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik Tahun 2015

1. *Terbatasnya Ruang Gerak Pemantau Pemilu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjalankan kegiatan Pemantauan pemilu sudah tentu bukan merupakan hal baru bagi organisasi KIPP. Sejak awal kemunculannya, KIPP adalah inisiator pertama dari kegiatan pemantauan pemilu oleh masyarakat di era *orde baru*. Dari Jakarta, semangat pemantauan pemilu yang independen dapat menyebar hingga ke Gresik yang *notabene* merupakan sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Hal itu menunjukkan fakta kehadiran KIPP telah diterima oleh masyarakat luas.

Pertama kali dimasukkannya unsur pemantau pemilu dalam undang-undang pada tahun 2003 menjadi angin segar bagi KIPP untuk terus mengembangkan gerakan organisasinya. Ini merupakan babak baru bagi KIPP. Ada harapan besar ketika bidang yang menjadi *concern* KIPP telah memiliki dasar hukum yang jelas di Republik Indonesia. Penyelenggara, pengawas serta pemantau pemilu dapat bersinergi dan saling menguatkan. Penyelenggaraan pemilu pasca reformasi pun dinilai akan semakin berkualitas.

Namun, fakta di lapangan justru bertolak belakang dengan tujuan pemantau yang ingin menambah kredibilitas pemilu setelah dipayungi hukum dalam aturan undang-undang. Seperti halnya pemantauan KIPP Gresik dalam Pilkada Gresik 2015 yang diakui oleh para pengurusnya belum berjalan dengan ideal. KIPP yang telah bertahun-tahun melakukan pemantauan dalam setiap pemilu faktanya masih merasa terhambat dalam melakukan kegiatannya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Khoirun Ni’am selaku pengurus divisi pendidikan KIPP, beliau menuturkan bahwa kendala pemantauan pemilu terdapat pada prosedur yang mengakibatkan sangat terbatasnya hak pemantau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilu. Beliau memberikan contoh salah satu peraturan yang mengharuskan para pemantau pemilu untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara hanya dari luar TPS. Hal tersebut menurutnya menjadikan lembaga pemantau terkesan hanya menjadi penonton, bukan pemantau pemilu,

> "Kendalanya mungkin ada pada hak lembaga pemantau yang memang sangat terbatas. Misalnya dalam proses pemungutan suara dimana aturan yg berlaku bagi Pemantau Pemilu harus berada di luar TPS. Hal tersebut yang menjadikan kami terkesan bukan sebagai lembaga pemantau tapi penonton pemilu".[16]

Begitu juga pendapat Maslukhin Musda, beliau menganggap bahwa sempitnya ruang gerak menjadikan adanya kegalauan dalam arah gerakan KIPP,"Aturan yang berlaku justru mempersempit ruang gerak para pemantau, organisasi semakin kerdil karena kegalauan dalam arah gerakan".[17]

Pada undang-undang nomor 10 tahun 2008, pasal 236, ayat 1, huruf (c) yang diganti ke undang-undang nomor 8 tahun 2012, pasal 238 ayat 1 huruf (c) serta petunjuk teknis pemantauan pemilu dalam pasal 18, PKPU nomor 10 tahun 2012, huruf (c) memang menerangkan bahwa pemantau pemilu memiliki hak untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS. Aturan inilah yang dipermasalahkan para pengurus KIPP Gresik karena dianggap hanya akan menghambat kinerja dalam pemantauan pemilu. Dua undang-undang terbaru yang dirancang untuk menyempurnakan undang-undang pemilu nomor 12 tahun 2003 ternyata justru dianggap mendiskreditkan pemantau pemilu.

---

[16] Khoirun Ni'am, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret, 2016.
[17] Maslukhin Musda, *Wawancara,* Gresik, 4 Maret, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Problem dalam praktik pemantauan ditemukan peneliti setelah mendengar beberapa testimoni para informan yang tak begitu melihat urgensi atas kehadiran para pemantau dalam proses pemungutan suara pada pemilu. PPL Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Taufiq Ardath menceritakan ketika proses pemungutan suara dalam Pilkada Gresik 2015, ia membiarkan anggota KIPP Gersik mondar-mandir di luar TPS setelah melakukan kordinasi dengan dirinya,

> ”Setelah kordinasi dengan saya, saya biarkan anggota pemantau tersebut mondar-mandir di luar TPS. Kalau ada ketidaksesuaian prosedur yang dilihat, dia saya suruh ngomong”.[18]

Sedangkan menurut M. Kholil, PPL di Desa Pangkah Kulon menyatakan bahwa Anggota KIPP Gresik disuruhnya untuk menemani pengawas TPS di TPS 09,

> “Benar bahwa ada anggota pemantau bernama M. Zainal yang menghubungi saya pada saat Pilkada kemarin, dia minta izin untuk melakukan pemantauan, saya menyuruhnya untuk menemai saudara Munir di TPS 09”.[19]

Dikatakannya bahwa kehadiran pemantau dapat membantu pengawas TPS, “Ya setidaknya para pemantau dapat menjadi teman diskusi pengawas TPS di Lapangan”.[20]

Kondisi demikian juga dipertanyakan Ahmad Zilham yang merupakan pengurus salah satu partai di tingkatan ranting, “Kenapa pemantau pemilu hanya duduk di luar TPS, kenapa mereka tidak didudukkan saja di samping

[18] Taufiq Ardath, *Wawancara*, Gresik, 10 Juli 2016.
[19] M. Kholil, *Wawancara*, Gresik, 10 Juli 2016.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi, kalo cuma duduk di luar terlihat kurang berwibawa".[21] Di lapangan, memang hanya saksi-saksi dari tim pemenangan kontestan Pilkada yang diperbolehkan masuk ke dalam TPS selain unsur penyelenggara, pengawas, dan pemberi suara. Bagi para saksi, disediakan kursi untuk mereka duduk di dalam TPS.

M. Yusron, seorang ketua KPPS di Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, mengaku bahwa TPS yang diketuainya sempat didatangi pemantau walaupun cuma sebentar, "TPS 01 di Kelurahan Bedilan ini sempat didatangi seorang pemantau, namun hanya beberapa menit kemudian dia sudah pergi".[22] Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh mekanisme gilir-pindah yang dilakukan oleh sang pemantau sesuai dengan intruksi para pengurus KIPP Gresik.

Seluruh proses dalam pemilu beserta penyelenggaranya adalah obyek dari pemantauan ataupun pengawasan pemilu. KPU dan kegiatannya sudah tentu juga menjadi obyek yang dipantau KIPP. Akan tetapi, KIPP sebagai organisasi pemantau terlebih dahulu harus mendaftarkan diri dan perlu mendapatkan akreditasi dari KPU jika ingin memantau penyelenggaraan pemilu. Inilah hal lain yang menurut peneliti perlu kita cermati dari praktik undang-undang pemantau pemilu yang berlaku hari ini. Selain itu, KIPP juga wajib membuat laporan tertulis kepada KPU terkait hasil pemantauan pemilu yang telah dilakukan.

---

[21] Ahmad Zilham, *Wawancara*, Gresik, 10 Agustus 2016.
[22] M. Yusron, *Wawancara*, Gresik, 10 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita lihat praktik di lapangan, sinergitas KIPP ketika menjadi lembaga pemantau lebih dekat kepada Panwaslih ketimbang KPU. Bisa kita lihat dari pernyataan Ali Mahmud ketika menjawab pertanyaan peneliti tentang tindak lanjut temuan KIPP dalam pemantauan pemilu,

> "Langsung kita koordinasikan dengan Panwas mas, karena memang ranah penegakan ada di Panwas maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Mereka langsung melakukan tindakan, dikordinasikan dengan Panwas yang bertugas di Kecamatan dan diselesaikan sesuai prosedur. Semisal dalam proses pemungutan suara kemarin terdapat beberapa TPS yang tidak menempelkan daftar DPT, maka kita laporkan ke Panwas dan langsung ditindak. Intinya kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menegakkan prosedur dalam Pemilu".

Urgensi akreditasi kepada KPU semakin dipertanyakan jika kita melihat fakta dan pendapat beberapa pengurus KIPP Gresik yang menganggap bahwa pemantau tak ubahnya seperti penonton ketika melakukan pemantauan pada proses pungut-hitung dalam pemilu.

2. *Problem Manajemen Internal KIPP Gresik*

Peneliti sangat menyayangkan tidak adanya pencatatan seluruh laporan dari KIPP terhadap pelanggaran-pelanggaran yang langsung dikoordinasikan kepada Panwaslih saat tahapan lain sebelum tahapan pungut-hitung dalam Pilkada kemarin. Hanya terdapat sepuluh kejadian di lapangan yang dicatat KIPP Gresik pada hasil kajian dan temuan dalam laporan akademiknya.

Hal itu menjadikan peneliti memiliki asumsi bahwa masih terdapat banyak fakta yang luput dari laporan pemantauan KIPP Gresik. Asumsi tersebut bahkan didasari oleh data hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengurus KIPP. Misalnya ketika peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahmud selaku Bendahara KIPP Gresik tentang hal yang paling menarik untuk dicermati dalam proses Pilkada kemarin, beliau menjawab,

> "Hal yang menarik untuk dicermati dalam Pilkada kemarin menurut kami ada ketika beberapa warga melaporkan oknum yang terduga melakukan money politik.Oknum tersebut juga merupakan anggotaKPPS di tempat tinggalnya. Situasi sempat memanas ketika kasus ini sedang dalam penanganan PANWAS.Intervensi dari salah satu pendukung pasangan calon dengan pengerahan masa untuk menduduki kantor PANWAS sempat membuat suasana cukup mencekam".[23]

Fakta tersebut tidak peneliti temukan dalam laporan akademik KIPP, padahal dituturkan lebih lanjut bahwa KIPP pada waktu itu ikut mengawal permasalahan tersebut,

> "Beberapa anggota KIPP Gresik pada waktu itu turut serta berada di Kantor PANWAS untuk mengawal proses tindak lanjut kasus yang akhirnya diselesaikan oleh GAKUMDU. Alhamdulillah, kerusuhan dapat dihindari karena ketatnya penjagaan dari POLRES Gresik yang pada waktu itu menerjunkan sekitar seratus personil untuk mengamankan Kantor PANWAS".

Setelah dilakukan klarifikasi terkait tidak adanya catatan terkait kasus di atas, Ali Mahmud menjawab, "Saat itu bukan kami yang menemukan langsung terkait indikasi adanya *money politic*, untuk itu kami tidak mancatatnya dalam laporan temuan".[24]

Peneliti kemudian menemukan fakta lain bahwa tidak ada satupun laporan pelanggaran di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang berasal dari KIPP Gresik. Setelah melakukan penggalian dokumen-dokumen yang tersisa dari Sentra Gakumdu, diperoleh data bahwa terdapat sepuluh pelanggaran yang di proses oleh Sentra Gakumdu. Satu pelanggaran terdapat pada masa pencalonan, satu pelanggaran pada masa kampanye, dan

[23] Ali Mahmud, *Wawancara*, Surabaya, 6 Maret, 2016.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delapan pelanggaran mewarnai masa tenang.[25] Diantara pelanggaran tersebut adalah indikasi terjadinya *money politic*. Sementara tidak satupun indikasi *money politic* yang dilaporkan oleh KIPP Gresik.

Ketika ditanya soal laporan akademik yang hanya sedikit memuat temuan dalam pemantauan pilkada kemarin, Maslukhin mengatakan bahwa memang ada sedikit permasalahan ketika tidak semua pemantau melaporkan temuannya dan tidak semua temuan dicatat dalam laporan,

> "Memang dalam pemantauan kemarin beberapa pemantau tidak kembali ke sekretariat kami setelah terjun ke lapangan, mereka langsung pulang ke rumah. Terkait laporan, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tidak semua laporan dicatat dalam laporan".[26]

Menurut Ali Mahmud, kendala dalam pemantauan Pilkada kemarin memang lebih disebabkan oleh internal KIPP Gresik yang masih berupaya untuk melakukan pembenahan manajemen. Para pengurus mendorong agar para kader selalu aktif dalam setiap program yang dilaksanakan KIPP, bukan hanya aktif ketika ada momen pemilu saja. Lebih lanjut dituturkan bahwa kegiatan-kegiatan lain KIPP di luar pemantauan pemilu masih belum bisa dijalankan secara konsisten.

> "Kendala secara umum terkait pemantauan pada Pilkada kemarin yang mungkin masih belum maksimal sebenarnya lebih besar dipengaruhi oleh faktor internal di organisasi kami. KIPP Gresik memang masih perlu melakukan pembenahan manajemen agar pemantauan pemilu dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Di internal organisasi kita yang menjadi kendala salah satunya mengenai keaktifan para kader, kita perlu menumbuhkan semangat untuk aktif dalam KIPP bukan hanya ketika ada momen pemilu. Sesuai dengan tujuan organisasi KIPP, kita harus turut mengawal demokrasi secara umum".[27]

---

[25] Lihat Laporan Akhir Sentra Gakumdu Kabupaten Gresik Dalam Pilkada Gresik 2015.
[26] Maslukhin, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.
[27] Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 6 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian rutin di internal kader maupun diskusi interaktif dengan menghadirkan masyarakat semestinya menjadi kegiatan wajib yang dilakukan oleh KIPP Gresik di luar momen pemilu. Peneliti menganggap bahwa memang sangatlah penting bagi KIPP untuk benar-benar bisa menjalankan program kerjanya dalam tiap tahun. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh internal dapat memiliki manfaat untuk meningkatkan kapasitas para kader dalam bidang keilmuan politik secara umum, disamping fokus utama kegiatan KIPP identik pada bidang kepemiluan.

Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat serta terus berusaha memperkuat kehidupan berdemokrasi juga merupakan tanggung jawab KIPP Gresik. Jika kegiatan-kegiatan rutin di luar pemilu dapat dilakukan secara konsisten tentunya hal tersebut juga bermanfaat sebagai ajang konsolidasi untuk menjadikan KIPP Gresik semakin solid. Momen pemilihan umum hanyalah merupakan klimaks dari berjalannya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pola kaderisasi KIPP Gresik yang hanya memanfaatkan jaringan "kedekatan" antar teman tanpa adanya suatu mekanisme terstruktur merupakan faktor penunjang yang bisa saja melemahkan internal KIPP Gresik. Hal ini mungkin dikarenakan memang sulit bagi KIPP Gresik untuk mencari individu-individu yang memiliki minat untuk menjadi kader pemantau pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id